



Adaptive Systems and Decision-Making: Innovations in Policy Analysis for Public Transportation in Surabaya

Rizky Alfiah*, Jihan Alya Sabrina, Navis Salma Fiyara, Rusdi Hidayat N, Indah Respati Kusumasari

Business Administration, FISIP, UPN "Veteran" Jawa Timur

Abstrak: Proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik sangatlah sulit dan dinamis, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya, yang menghadapi banyak masalah sosial, lingkungan, dan urbanisasi. Seringkali, pendekatan tradisional untuk pengambilan keputusan tidak cocok dengan perubahan dan dinamika kontemporer. Kajian ini melihat sistem adaptif dan teori pengambilan keputusan sebagai inovasi dalam analisis kebijakan publik, khususnya di bidang transportasi umum Surabaya. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Kualitatif, dengan mengumpulkan dan menganalisis kajian literatur, penelitian ini menganalisis berbagai sumber data untuk memahami penerapan sistem adaptif dan teori pengambilan keputusan dalam pengelolaan transportasi publik di Surabaya. Salah satu kendala utama yang harus diatasi adalah masalah data yang terbatas, perlawanan pemangku kepentingan, dan kebutuhan tenaga ahli. Dalam upaya mendukung pembangunan transportasi umum yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan di Surabaya, penelitian ini menemukan peluang untuk inovasi pengambilan keputusan berbasis data yang relevan.

Kata kunci: Kebijakan Publik, Sistem Adaptif, Transportasi Umum Surabaya

DOI:

<https://doi.org/10.47134/par.v2i2.3478>

*Correspondence: Rizky Alfiah

Email:

23042010192@student.upnjatim.ac.id

Received: 01-12-2024

Accepted: 23-12-2024

Published: 01-02-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The decision-making process in public policy is difficult and dynamic, especially in big cities like Surabaya, which faces many social, environmental and urbanization issues. Often, traditional approaches to decision-making do not match contemporary changes and dynamics. This study looks at adaptive systems and decision-making theory as an innovation in public policy analysis, especially in the field of Surabaya public transportation. The research method used is Qualitative method, by collecting and analyzing literature review, this research analyzes various data sources to understand the application of adaptive systems and decision-making theory in the management of public transportation in Surabaya. One of the main obstacles that must be overcome is the problem of limited data, stakeholder resistance, and the need for experts. In an effort to support the development of more inclusive, effective, and sustainable public transportation in Surabaya, this research finds opportunities for relevant data-based decision-making innovations.

Keywords: Public Policy, Adaptive System, Surabaya Public Transportation

Pendahuluan

Membuat keputusan kebijakan publik adalah proses yang sulit dan dinamis. Kompleksitas ini semakin meningkat di zaman modern, terutama di kota-kota besar seperti Surabaya, di mana isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan saling bersinggungan secara dinamis. Dalam situasi seperti ini, sistem adaptif dan teori pengambilan keputusan muncul sebagai terobosan penting untuk menganalisis kebijakan publik dan merespons perubahan dengan lebih baik.

Surabaya, salah satu kota metropolitan di Indonesia, memiliki sejumlah tantangan, termasuk urbanisasi yang terus meningkat, peningkatan kebutuhan infrastruktur, masalah lingkungan, dan kesenjangan sosial. Sementara itu, tren global, seperti dampak teknologi digital, urbanisasi cerdas, dan perubahan iklim, mempengaruhi bagaimana pemerintah kota mengembangkan dan menerapkan kebijakan publik. Teknik pengambilan keputusan yang tradisional dan statis sering kali tidak mampu menghadapi fluktuasi ini.

Sistem adaptif, yang didasarkan pada gagasan ekologi dan teori sistem yang kompleks, memberikan pendekatan yang dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan para pembuat kebijakan untuk memasukkan berbagai variabel yang terus berubah dalam desain dan implementasi kebijakan. Di sisi lain, teori pengambilan keputusan memberikan kerangka kerja konseptual untuk memahami bagaimana keputusan kebijakan dibentuk, seperti identifikasi masalah, evaluasi alternatif, dan minimalisasi risiko.

Penggunaan sistem adaptif dan teori pengambilan keputusan di Surabaya memiliki potensi untuk menghasilkan inovasi besar dalam analisis kebijakan publik. Surabaya dapat menggunakan teknologi *big data*, kecerdasan buatan, dan simulasi berbasis komputer untuk menciptakan kebijakan yang lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Sistem adaptif, misalnya, dapat digunakan untuk mengendalikan lalu lintas di kota, memprediksi dampak aturan zonasi, dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan.

Namun, kesulitan dalam menerapkan sistem adaptif dan teori keputusan tidak dapat diabaikan. Keterbatasan data, resistensi pemangku kepentingan, dan kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompeten secara teknis merupakan tantangan utama yang harus dipecahkan. Oleh karena itu, penelitian tentang integrasi sistem adaptif dan teori pengambilan keputusan dalam kebijakan publik di Surabaya menjadi sangat penting untuk menemukan solusi praktis dan inovatif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki peran sistem adaptif dalam mendukung analisis kebijakan publik di Surabaya, untuk menilai efektivitas teori pengambilan keputusan dalam menghadapi tantangan kebijakan publik yang kompleks dan dinamis, dan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam menerapkan sistem adaptif dan teori pengambilan keputusan untuk kebijakan publik di Surabaya. Selain itu, tujuan dari proyek ini adalah untuk menawarkan rekomendasi kreatif berdasarkan perpaduan antara sistem adaptif dan teori pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas keputusan kebijakan publik di Surabaya.

Tinjauan Pustaka

Dalam bahasa Inggris kebijakan publik disebut dengan *public policy*. Black Law Dictionary mengartikan *public* sebagai:

1. Berhubungan atau menjadi bagian dari suatu komunitas, negara bagian, atau bangsa
2. Terbuka atau tersedia untuk digunakan, dibagikan, atau dinikmati oleh semua orang
3. (dari suatu perusahaan) yang memiliki saham yang tersedia di pasar terbuka

Di sisi lain, kata *policy* diartikan sebagai:

1. Prinsip-prinsip umum yang menjadi pedoman pemerintah dalam mengelola urusan publik;
2. Dokumen yang berisi kontrak asuransi;
3. Jenis lotre di mana petaruh memilih nomor untuk dipertaruhkan dan memasang taruhan dengan penulis kebijakan

Menurut Bryan A. Garner. (2009) kebijakan publik didefinisikan sebagai, “standar-standar yang dibentuk oleh badan legislatif atau oleh pengadilan sebagai suatu pedoman mendasar bagi negara dan seluruh masyarakat.” Sedangkan definisi kebijakan publik secara umum diartikan sebagai suatu prinsip dan standar yang digunakan oleh pemerintah dalam mengelola urusan publik yang menjadi kewenangannya, serta bersifat mengikat terhadap seluruh warga negara.

Definisi Kebijakan publik menurut beberapa ahli yang lain :

- Robert Vance Presthus, “ Pilihan yang dibuat oleh individu atau kelompok yang menjelaskan, membenarkan, membimbing, atau menguraikan tindakan tertentu.”
- B. Guy Peters : “ Kebijakan publik adalah kumpulan atau pedoman kegiatan pemerintah, yang dilakukan secara langsung atau melalui agen pemerintahan lainnya, yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan warga negara.”
- Thomas R. Dye : “ Pencarian definisi terhadap istilah kebijakan publik dapat berubah menjadi permainan kata-kata.”

Dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah langkah atau pedoman yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik bersifat mengikat, sehingga pengambilan keputusannya harus dipikirkan secara matang karena akan berdampak luas pada kehidupan masyarakat.

Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah daerah setempat untuk mengatasi isu-isu yang ada di tiap daerah. Salah satu isu yang sering menjadi fokus kebijakan publik adalah penyediaan transportasi umum yang efektif dan efisien.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian berjudul "Sistem Adaptif dan Teori Pengambilan Keputusan: Inovasi dalam Analisis Kebijakan Transportasi Publik di Surabaya" menggunakan metode review literatur untuk menganalisis berbagai artikel, jurnal, dan literatur tentang pengambilan keputusan publik terutama pada sektor transportasi publik. Selain itu, peneliti membuat rangkuman hasil utama yang relevan dengan topik tersebut dan melakukan sintesis untuk menemukan tren, masalah, dan solusi untuk meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan publik.

Peneliti akan mencari informasi dari berbagai sumber untuk meningkatkan pemahaman tentang penerapan sistem adaptif dan teori pengambilan keputusan dalam analisis kebijakan transportasi umum di Surabaya. Studi literatur akan digunakan untuk menemukan metode terbaik, masalah, dan peluang inovasi yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan transportasi umum. Selain itu, untuk memastikan bahwa penelitian ini relevan dan memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan kebijakan transportasi umum di Surabaya, peneliti akan melihat perkembangan terbaru dalam penerapan sistem adaptif dan teori pengambilan keputusan. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghasilkan analisis yang komprehensif, inovatif, dan sesuai dengan kebutuhan lokal untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih efektif dalam konteks Surabaya.

Hasil dan Pembahasan

A. Definisi Pengambilan Keputusan

Setiap hari, manusia mengambil keputusan, dan mereka dikenal sebagai pengambil keputusan atau *decision maker*. Proses ini menjadi penting bagi seseorang untuk mengambil keputusan yang mengubah kehidupannya. Pengambilan keputusan sangat penting bagi pemimpin karena mereka dapat memberikan dampak positif pada keberlangsungan perusahaan. Oleh karena itu, kemampuan untuk mengambil keputusan, seperti mengidentifikasi masalah dan kemungkinan, menentukan pilihan, dan menggunakan metode yang efektif, sangatlah penting. Untuk mengambil keputusan yang baik, harus memilih dengan cermat dari berbagai opsi yang tersedia.

Keputusan yang diambil dalam organisasi dapat mempengaruhi penyelesaian masalah dan keberlangsungan organisasi. Karena keputusan manajer akan dilaksanakan oleh bawahannya dan mempengaruhi masa depan perusahaan, maka manajer harus memiliki kemampuan mengambil keputusan yang baik. Keputusan yang baik adalah keputusan yang penting dan dapat diterima secara sosial. Hendra Riofita (2015) mengatakan bahwa mengambil keputusan adalah memilih pilihan terbaik dari banyak pilihan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Menurut teori berpikir sistem,

pengambilan keputusan harus dilakukan setelah menganalisis semua aspek lingkungan, mempertimbangkan keinginan, dan membuat keputusan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah saat ini. Semakin baik kemampuan seseorang untuk membuat keputusan, semakin baik keputusan yang dihasilkan.

Untuk pengambilan keputusan yang efektif dan efisien terdapat beberapa unsur dasar yang perlu diperhatikan, diantaranya:

1. Tujuan Pengambilan Keputusan: Memahami tujuan memungkinkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif dan efisien. Setiap organisasi memiliki tujuan tertentu untuk menyelesaikan masalahnya. Oleh karena itu, sangat umum bagi manajer bisnis untuk mempelajari teknik pengambilan keputusan agar mereka dapat melaksanakan visi dan misi perusahaan mereka dengan efektif.
2. Identifikasi alternatif - alternatif keputusan untuk memecahkan masalah:
Selama proses pengambilan keputusan, seseorang biasanya dihadapkan pada berbagai pilihan, yang membuatnya sulit untuk memilih pilihan terbaik. Oleh karena itu, penting bagi individu untuk mempelajari manajemen risiko agar mereka dapat mengambil keputusan yang lebih efektif dan dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi di masa depan.
3. Perhitungan mengenai faktor-faktor yang tidak diketahui/ tidak terpikirkan sebelumnya: Peristiwa yang berada di luar kendali manusia didefinisikan sebagai kejadian yang dapat diprediksi sebelumnya tetapi tidak dapat dikendalikan. Akibatnya, pengambil keputusan harus mempersiapkan manajemen risiko untuk menghadapi kondisi-kondisi ini.
4. Sarana atau alat untuk mengukur hasil pengambilan keputusan : Sangat penting untuk menjelaskan setiap langkah dan pertimbangan sebelum mengambil keputusan, karena tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi yang di luar kendali manusia. Dengan memberikan penjelasan yang jelas, pengambil keputusan dapat memahami dampak potensi dari keputusan mereka dan menemukan risiko. Hal ini memungkinkan mereka untuk membuat rencana mitigasi yang tepat untuk mengurangi dampak negatif.

Aspek pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu aspek internal dan eksternal

1. Internal: Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu pengalaman dan wawasan yang diperoleh selama masa kepemimpinan sebelumnya, serta aspek kepribadian yang tidak terlihat tetapi ditanamkan sejak lahir. Pengalaman dan wawasan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan tantangan yang mungkin dihadapi seseorang, sementara aspek kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang membuat keputusan, meskipun tidak

selalu terlihat. Keduanya berinteraksi satu sama lain dan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan yang lebih kompleks dan berubah-ubah.

2. Eksternal: Aspek ini juga termasuk dalam dua kategori: pertama adalah kultur atau keyakinan dan kebiasaan yang dianut dari lingkungan tempat seseorang dibesarkan, dan kedua adalah orang-orang di sekitar yang menjadi panutan dalam tindakan mereka. Pengaruh orang-orang di sekitarnya, seperti keluarga, teman, atau mentor, dapat menjadi contoh atau referensi yang signifikan untuk pola pikir dan nilai-nilai seseorang. Baik berinteraksi satu sama lain, mempengaruhi perilaku dan keputusan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

B. Definisi Transportasi Umum

Transportasi umum mempunyai peranan penting dalam pembangunan perkotaan. Kapasitas angkutan umum yang besar membantu mengurangi kemacetan lalu lintas dan mendorong mobilitas masyarakat. Ia memiliki kemampuan transportasi yang besar. Widayant dkk. (2014) menemukan bahwa penggunaan transportasi umum yang efektif mengurangi kebutuhan akan kendaraan pribadi.

Widayant dkk. (2014) menekankan pentingnya transportasi umum di perkotaan, karena mayoritas penduduk sangat bergantung pada transportasi umum untuk berkeliling dan melakukan tugas sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di lokasi-lokasi ini telah menyebabkan urbanisasi yang luas dan peningkatan kesempatan kerja bagi penduduknya. Lebih banyak peluang kerja bagi kebanyakan orang. Akibatnya, wilayah perkotaan melihat peningkatan pesat dalam jumlah pekerja dan penduduk.

Surabaya, salah satu kota terpadat di Indonesia, menghadapi peningkatan lalu lintas mobil yang tidak seimbang di jalan-jalannya. Jaringan jalan raya di Surabaya tidak mampu mengimbangi perkembangan jumlah penduduk. Melayani transportasi Kota Surabaya telah mengurangi kemacetan lalu lintas dengan memperluas jaringan SITS dan meningkatkan rekayasa lalu lintas di beberapa wilayah. Pemerintah Kota Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah no. 7/2006 tanggal 10 Agustus 2006 untuk mengatur angkutan jalan umum. Kemacetan terjadi ketika lalu lintas tidak stabil, sehingga mengakibatkan penurunan kecepatan karena adanya hambatan dan terbatasnya pergerakan. Kapasitas jalan yang tidak mencukupi menyebabkan kemacetan lalu lintas (Haryono & Prawesthi, 2015).

Peningkatan output dan mobilitas yang tidak memadai menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor. Permasalahan lainnya adalah kurangnya transportasi transit yang menghubungkan wisatawan dari daerah terpencil ke jalur transportasi umum utama. (Slamet.2015). Masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi untuk menghemat waktu karena transportasi umum di Surabaya tidak aman dan waktu keberangkatan yang tidak

nyaman. Buruknya kinerja otoritas transportasi perkotaan berkontribusi terhadap kemacetan lalu lintas dan menyebabkan masalah struktural. Permasalahannya antara lain perencanaan pertanahan dan transportasi yang tidak terkoordinasi, tingkat kemacetan yang tinggi, dan tingkat efisiensi yang buruk.

C. Tantangan dalam pengambilan keputusan publik

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan data yang dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang diambil. Terkadang, data yang tersedia tidak lengkap atau tidak akurat, sehingga membuat proses pengambilan keputusan kurang terinformasi. Keterbatasan ini dapat mengakibatkan keputusan yang tidak optimal atau bahkan kontraproduktif. Misalnya, dalam konteks transportasi umum sangat dibutuhkan data demografis (jumlah populasi), mobilitas (rute perjalanan dan jam sibuk), infrastruktur (fasilitas transportasi, seperti halte, bus, dan jalur khusus), sarana transportasi (Kelayakan sarana dan biaya pemeliharaan), ekonomi (biaya operasional dan kemampuan membayar masyarakat), dan sosial (kepuasan dan kepercayaan masyarakat) harus diperhatikan. Data yang tidak lengkap akan mempengaruhi pengambilan keputusan yang merugikan bagi masyarakat.

Kompleksitas masalah juga menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Seringkali pemerintah menghadapi masalah yang memiliki banyak faktor yang saling terikat dan mempengaruhi. Misalnya, saat menyusun kebijakan transportasi umum pemerintah harus mempertimbangkan kompleksitas dalam berbagai kepentingan seperti, kepentingan masyarakat, pelaku usaha, pemerintah pusat dan daerah, serta kepentingan politis. Selain kompleksitas, ketidakpastian juga merupakan tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil seringkali diambil berdasarkan perkiraan atau prediksi. Adanya ketidakpastian membuat risiko sulit untuk diidentifikasi dan dinilai dengan jelas.

D. Dampak dari keputusan yang kurang tepat dan efisien terhadap masyarakat dan pemerintah.

Pengambilan keputusan publik yang tidak tepat dan kurang efisien dapat berdampak buruk pada masyarakat dan pemerintah. Salah satu efek yang paling nyata adalah pemborosan sumber daya. Ini menghabiskan waktu, uang, dan sumber daya. Hal ini sering terjadi ketika keputusan dibuat tanpa mempertimbangkan analisis yang menyeluruh atau tanpa menggunakan data yang akurat sebagai dasar pertimbangan.

Dampak Pemborosan Sumber Daya:

1. Keuangan Publik: Seringkali, anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat dibuang begitu saja. Misalnya, ketika pemerintah meluncurkan proyek infrastruktur

tanpa melakukan penelitian yang memadai tentang kebutuhan, proyek tersebut tidak digunakan secara efektif oleh masyarakat. Pembangunan fasilitas umum yang jarang digunakan, seperti stadion olahraga, menghabiskan anggaran tanpa memberikan manfaat yang setara.

2. Waktu dan Tenaga Kerja: Selain menghabiskan uang, keputusan yang buruk juga menyia-nyiakan waktu dan tenaga karyawan. Salah satu contohnya adalah pengadaan proyek yang gagal mencapai hasil yang diinginkan karena tidak ada perencanaan yang baik. Hal ini menyebabkan waktu, tenaga kerja, dan sumber daya yang dihabiskan sia-sia.
3. Kepercayaan Publik: Keputusan yang salah dapat menyebabkan persepsi negatif terhadap pemerintah, yang pada gilirannya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pemerintah sering dianggap gagal mengelola sumber daya publik.

Pemerintah harus menerapkan pendekatan berbasis data untuk menghindari pemborosan. Pemerintah dapat memastikan bahwa keputusan yang dibuat benar-benar relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan analisis *big data* dan melibatkan para ahli. Analisis yang cermat dapat membantu memprioritaskan proyek yang memiliki dampak nyata, yang memungkinkan alokasi sumber daya yang optimal. Oleh karena itu, keputusan yang efektif tidak hanya menghindari pemborosan sumber daya tetapi juga meningkatkan kesejahteraan umum.

Ketidakpuasan masyarakat yang disebabkan oleh kebijakan yang tidak memadai dapat menyebabkan berbagai reaksi negatif, mulai dari keluhan hingga intensitas yang besar. Ketidakpuasan ini dapat berkembang menjadi konflik sosial atau gangguan keamanan dalam situasi tertentu, terutama jika masyarakat percaya bahwa hak-haknya diabaikan atau kebijakan yang diterapkan tidak transparan. Misalnya, keputusan untuk membangun proyek besar tanpa melibatkan komunitas lokal sering menghasilkan perjanjian, seperti enkripsi atau jaminan proyek secara paksa.

Ketidakpuasan masyarakat juga dapat mengganggu stabilitas politik. Ketika pemerintah kehilangan kepercayaan masyarakat, sulit untuk mendapatkan dukungan untuk kebijakan baru. Hal ini dapat mengganggu pelaksanaan kebijakan di masa depan, memperlambat kemajuan pembangunan, dan memperlambat hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Pada akhirnya, ketidakpuasan ini memiliki konsekuensi jangka panjang, yaitu mengganggu proses pemerintahan karena pemerintah harus menahan resistensi yang terus menerus dari masyarakat.

Karena kepercayaan yang rusak, sulit bagi pemerintah untuk mendapatkan dukungan publik terhadap kebijakan yang akan datang. Karena masyarakat kurang percaya pada niat baik pemerintah, tanpa dukungan, pelaksanaan program atau agenda politik menjadi lebih sulit. Akibatnya, hal ini dapat menghambat kemajuan dan stabilitas pemerintahan, dan

menghambat upaya untuk membuat kebijakan yang lebih baik di masa depan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk menjaga kredibilitasnya dengan memastikan bahwa setiap keputusan dibuat berdasarkan analisis yang mendalam dan jujur.

Dalam jangka panjang, keputusan yang tidak tepat dan tidak efisien dapat menyebabkan refleksi yang lebih besar di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kebijakan yang tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang atau efek sampingan yang mungkin terjadi dapat menyebabkan kerugian ekonomi, ketidaksetaraan sosial, dan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan hasil jangka panjang dari keputusan mereka dan memastikan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada perhitungan dan analisis yang menyeluruh.

E. Lembaga yang terlibat dalam pembuatan kebijakan publik transportasi Surabaya dalam program Suroboyo Bus

Pengelola dan pencetus konsep Suroboyo bus, serta pemangku kepentingan lainnya, tentu memiliki beberapa kepentingan yang ingin dicapai selama tahap perencanaan dan pelaksanaan. Lembaga lain yang ikut terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program Suroboyo Bus adalah Lembaga eksekutif dan legislatif. Hal ini dikarenakan setiap program pemerintah dimulai dan dijalankan oleh lembaga eksekutif, sedangkan lembaga legislatif terlibat dalam pengelolaan dan perencanaan program. Dalam suatu pemerintahan, lembaga legislatif berfungsi sebagai badan yang mengawasi dan mengesahkan semua perencanaan program. Sedangkan Lembaga eksekutif bertindak sebagai inisiator dan eksekutor atas setiap program yang dilakukan dalam suatu pemerintahan. Lembaga eksekutif yang terlibat dalam proses penyusunan kebijakan suroboyo bus ini adalah Walikota, Dinas Perhubungan (DISHUB), Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) dan BAPPEKO Kota Surabaya. Sementara itu, Lembaga legislatif yang terlibat adalah DPRD Komisi B dan Komisi C, Kota Surabaya.

Kebijakan program Suroboyo bus disusun sejak tahun 2012 dan dieksekusi pada tahun 2016 yang dimulai dengan penyusunan rancangan anggaran oleh BAPPEKO. Kemudian, pada tahun 2017 DISHUB mulai dilibatkan dalam pengadaan unit Suroboyo bus. Secara garis besar tugas yang dimiliki oleh DISHUB mengarah pada masalah teknis. Sedangkan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau (DKRTH) bertugas dalam membantu pengelolaan sampah plastik yang digunakan dalam pembayaran pengguna Surabaya bus. Sementara Walikota Surabaya memegang peran sebagai inisiator dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur Pemerintah Kota Surabaya.

Sebagai lembaga legislatif yang terlibat dalam program Suroboyo bus, Komisi B DPRD Surabaya bertanggung jawab terkait kebijakan retribusi. Sedangkan Komisi C DPRD Surabaya bertanggung jawab dalam kebijakan moda transportasi. Pembagian tugas ini

dikarenakan DPRD memiliki 3 fungsi, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh sebab itu pada program Suroboyo bus DPRD bertanggung jawab sebagai penyusun regulasi dalam proses pembentukan kebijakan Suroboyo bus.

F. Kepentingan yang dipengaruhi kebijakan publik

Kepentingan mempengaruhi sejauh mana kelompok sasaran dilibatkan dalam kebijakan. Peraturan Daerah Kota Surabaya no. 07/2006 merupakan upaya Departemen Perhubungan untuk memberikan pelayanan angkutan umum bagi masyarakat. Kebijakan ini diterapkan oleh dinas perhubungan pemerintah setempat untuk mendorong masyarakat menggunakan angkutan umum dan membatasi penggunaan kendaraan pribadi. Hal ini sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab yang tertuang dalam Perwali Nomor 26 Tahun 2009 yang mewajibkan angkutan umum berada di zona yang telah ditentukan. Hal serupa juga terjadi pada penelitian (Yuniarti & Erowati, 2022) yang menguraikan kepentingan-kepentingan yang berdampak pada kebijakan dengan dukungan dari pemerintah kota dan instansi terkait untuk memastikan bahwa program tersebut terlaksana sesuai peruntukannya. Dari sisi kepentingan masyarakat, peraturan daerah ini memungkinkan pemerintah menjamin kenyamanan dan keamanan transportasi umum, mendorong masyarakat untuk mengubah perilaku dan mulai menggunakan transportasi umum. Pemerintah menggunakan kegiatan sosialisasi untuk menyebarkan informasi, seperti mendorong penggunaan angkutan umum. Masyarakat perlu mewaspadaai kebijakan transportasi umum guna mengurangi kemacetan.

Selain itu, adapun jenis manfaat yang akan terjadi jika menerapkan kebijakan publik. Jenis - jenis manfaat digunakan untuk menilai apakah suatu kebijakan akan menghasilkan manfaat dan memberikan dampak yang menguntungkan ketika diterapkan. Manfaat Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 07 Tahun 2006 yaitu:

- 1) dengan menggunakan angkutan umum dapat mengurangi kemacetan.
- 2) langit biru atau polusi, lebih banyak menggunakan kendaraan pribadi maka akan menyebabkan peningkatan polusi yang ada, dan apabila masyarakat kembali transportasi umum dapat mengurangi tingkat polusi.
- 3) efisiensi waktu, berkaitan dengan banyaknya penggunaan kendaraan pribadi yang akan menimbulkan kemacetan lalu lintas, kemudian akan menambah waktu tempuh. Di mana hal ini sama dengan penelitian sebelumnya (Yuniarti & Erowati, 2022) menunjukkan bahwa manfaat yang dihasilkan dapat dirasakan mulai dari respons yang diberikan oleh sasaran dalam pelaksanaan program. Keberhasilan suatu program dan memastikan bahwa manfaat yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Simpulan

Teori pengambilan keputusan dan sistem adaptif menawarkan pendekatan yang relevan untuk mengatasi masalah kebijakan transportasi umum Surabaya. Kebijakan transportasi publik yang adaptif memungkinkan kebijakan transportasi publik lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat seperti pola perjalanan, pertumbuhan populasi, dan dampak lingkungan. Hal ini disebabkan masalah kompleks kota seperti kemacetan, peningkatan jumlah kendaraan, dan kesenjangan akses transportasi. Sebaliknya, teori pengambilan keputusan membantu pembuat kebijakan membuat strategi yang lebih terstruktur. Ini membantu mereka menemukan masalah transportasi dan menemukan solusi terbaik. Keterbatasan sumber daya, ketidaksetujuan pemangku kepentingan, dan masalah koordinasi antar lembaga menghalangi penggunaan metode ini, meskipun memiliki banyak potensi.

Membangun sistem transportasi publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus menjadi fokus utama pemerintah Surabaya. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan kolaborasi antar lembaga dan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, sistem transportasi publik yang lebih adaptif harus diterapkan secara bertahap dan didukung oleh peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menangani perubahan yang dinamis. Di masa depan, upaya ini diharapkan dapat membantu mewujudkan layanan transportasi yang lebih efisien, inklusif, dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Awahah, R. A., Widodo, J., & Radjikan, R. (2024). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum Sebagai Upaya Mengurangi Kemacetan Di Kota Surabaya Jawa Timur. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 62-72.
- Fillah, D. C., Sabela, A. T., & Fitrie, R. A. (2024). Rasionalitas Pengambilan Keputusan Feeder Dan Surabaya Bus Terhadap Nasib Sopir Angkutan Umum Konvensional Menurut Teori Rasionalitas Max Weber. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(2), 335-346.
- Salsabila, T. H., Indrawati, T. M., & Fitrie, R. A. (2024). Meningkatkan Efisiensi Pengambilan Keputusan Publik melalui Kecerdasan Buatan. *Journal of Internet and Software Engineering*, 1(2), 21-21.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). Pengantar Kebijakan Publik. *Humanities Genius*.

Winaryo, M. B. (2019). Peran Pemerintah Kota Surabaya dalam Pengaturan Transportasi Publik Kota Surabaya: Studi Perkotaan Program “Suroboyo Bus” (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).